

**IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM MENDORONG
PROSES PEMBANGUNAN DESA
(Studi Pada Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



Oleh:

JEFRIANUS DOUNGU LOLA

2016210082

**KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG**

2023

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM MENDORONG PROSES PEMBANGUNAN DESA (Studi Pada Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu)

Dr. Agung Suprojo, S.Kom., M.AP1, Firman Firdausi, S.H., M.H2, Jefrianus
Doungu Lola3

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

Email: jefrianus18lolla@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana pembangunan partisipatif digunakan untuk mendorong pembangunan desa di Desa Sumberejo. Dalam rangka memberdayakan masyarakat dalam menentukan kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai dasar perencanaan pembangunan, maka lahirlah gagasan pembangunan partisipatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode yang digunakan dalam mendorong pembangunan partisipatif di Desa Sumberejo, serta unsur-unsur yang memfasilitasi dan menghambat penggunaannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik. Data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data, dengan menggunakan purposive sampling untuk memilih informan yang relevan. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan validitas data. Dengan menggunakan metode dan teknik ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan partisipatif dalam mendorong proses pembangunan desa di Desa Sumberejo sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan informan yang menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dan pelibatan mereka dalam perencanaan pembangunan desa. Faktor-faktor yang menghambat pembangunan partisipatif antara lain adalah partisipasi dalam perencanaan yang masih terbatas, keterbatasan dana, dan faktor-faktor pendukungnya antara lain adalah transparansi pemerintah desa, keterlibatan masyarakat, dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Partisipatif, Pembangunan Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia ialah negara yang memiliki visi misi yang mulia, hal didasarkan pada UUD 1945. Yang berbunyi “untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Tanpa mendorong sumber daya manusia yang unggul untuk membantu pertumbuhan lokal dan nasional, hal ini tidak dapat tercapai. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan pendidikan tinggi yang didukung oleh kerjasama pemerintah dan masyarakat yang efektif dan efisien dapat dianggap sebagai indikator keberhasilan pembangunan nasional. (Taqiuddin, 2021).

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Hal ini benar karena keterlibatan masyarakat sangat erat kaitannya dengan demokrasi, yang menekankan kedaulatan rakyat. Keterlibatan dalam masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk keterlibatan aktif dalam upaya legislatif atau dukungan finansial, intelektual, emosional, dan moral untuk perumusan kebijakan publik. Meskipun demikian, kuantitas peserta seringkali menjadi satu-satunya ukuran yang digunakan untuk menilai keterlibatan masyarakat. Akses masyarakat terhadap informasi sangat berkaitan dengan keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat belum diformalkan sebagai praktik rutin, khususnya dalam pengambilan keputusan. Saat ini keterlibatan

masyarakat hanya diperbolehkan dalam pelaksanaan program pemerintah. Pada kenyataannya, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam semua tahap penyelesaian, termasuk penjadwalan dan pengambilan keputusan (Laksana, 2013).

Gagasan pembangunan aktif mengacu pada cara masyarakat berpartisipasi dalam menentukan kebutuhannya sendiri atau serangkaian kebutuhan sebagai landasan proses perencanaan pembangunan. Pertumbuhan dan pembangunan desa juga adalah salah satu jenis bidang integral dari pembangunan daerah dan nasional yang diukur dari segi keterlibatan ataupun kontribusi masyarakat. Keterlibatan dalam masyarakat mengandung prakarsa, gotong royong, dan kerja sama yang merupakan salah satu aktivitas yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Swadaya dan kolaborasi timbal balik ditandai dengan keterampilan dengan kerabat, sedangkan inisiatif menunjukkan motivasi dan keinginan. Oleh karena itu, hal tersebut harus ditata dengan baik (Deswimar, 2014).

Peningkatan kapasitas aparat pemerintahan daerah serta organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam mendukung pelaksanaan manajemen pembangunan daerah. Dengan meningkatkan kapasitas mereka, mereka dapat berperan dengan baik dalam kegiatan demokrasi dan pembangunan yang komprehensif.

Dalam periode pemerintahan yang terdesentralisasi ini, pembangunan harus memberikan penekanan yang lebih besar pada peningkatan tenaga kerja sehingga masyarakat juga dapat memanfaatkan serta pengelolaan SDM dengan jangka panjang dan memberikan layanan yang dibutuhkan masyarakat. Keterlibatan langsung masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan ini dan harus diperkuat serta dipromosikan. Keterlibatan masyarakat harus diwujudkan secara nyata

melalui berbagai inisiatif dan perumusan kebijakan pembangunan, bukan sekadar retorika kosong. Keberhasilan jangka panjang pemerintah bergantung pada minat, keterlibatan, dan dukungan masyarakat serta kepuasan masyarakat terhadap layanan yang ditawarkan. Masyarakat yang memiliki akses terhadap informasi akurat yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pemerintah diperlukan agar demokrasi dapat berjalan secara efektif. Keterlibatan penuh seluruh pelaku pembangunan daerah sangat penting, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan pengawasan. Pemerintah hanya dapat mewujudkan sistem pengelolaan pembangunan daerah yang terpadu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengintegrasikan semua pihak dan menjunjung tinggi keterbukaan dalam seluruh proses pembangunan. (Lubis, 2009).

Tujuan pembangunan satu-satunya adalah menghasilkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pada saat semua masyarakat dalam suatu negara mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat berkembang dan mengambil manfaat dari hal tersebut, maka kemajuan akan berhasil. Hal ini juga menjadi sangat penting juga untuk fokus pada isu-isu seperti keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan kesejahteraan individu untuk mencapai tujuan ini. Kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik bagi kita semua dengan bekerja keras dan berkolaborasi (Astuti, 2021). Oleh karena itu, ada beberapa faktor atau unsur yang perlu diperhatikan agar pembangunan dapat berjalan efektif. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah salah satunya. Dalam hal ini konsep pembangunan partisipatif di desa sumberejo perlu untuk diperhatikan atau diteliti karena terdapat ketimpangan dalam konsep pembangunan yang melibatkan rakyat secara langsung,

permasalahan yang ditemui dari peneliti dalam observasi awal didapatkan bahwa masyarakat hanya dijadikan sebagai objek dari pembangunan. Adapun masyarakat yang terlibat dalam pembangunan hanya segelintir orang yakni mereka yang tergabung dalam pemerintahan desa dan tokoh masyarakat yang dianggap penting di lingkungan desa Sumberejo.

Melibatkan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan sangat penting. Pihak yang mengetahui masalah-masalah yang dibutuhkan di suatu wilayah desa adalah masyarakat setempat. Dengan melibatkan mereka, pembangunan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga akan memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara efektif dan efisien. Terakhir, melibatkan masyarakat dalam evaluasi pembangunan akan memastikan bahwa pembangunan tersebut berhasil dan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. (Kaawoan, 2020).

Melihat kondisi dan fenomena sosial tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan judul **“Implementasi Pembangunan Partisipatif Dalam Mendorong Proses Pembangunan Desa di Desa Sumberejo“**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pembangunan partisipatif dalam mendorong proses pembangunan desa di desa Sumberejo?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi pembangunan partisipatif dalam mendorong proses pembangunan desa di desa Sumberejo?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pembangunan partisipatif dalam mendorong proses pembangunan desa di desa Sumberejo
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi pembangunan partisipatif dalam mendorong proses pembangunan desa di desa Sumberejo.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis, sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan pembangunan partisipatif untuk mendukung proses pembangunan pemerintahan di Desa Sumberejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

2. Secara Praktis

Sebagai tolak ukur bagi Pemerintah Desa dalam pembangunan partisipatif dalam mendorong proses pembangunan pemerintah di Desa Sumberejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Purbantara Mujianto. 2019. *Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia*. Cetakan Pertama.
- Dwiyanto, Bambang Sugeng dan Jemadi. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui PNPB Mandiri Perkotaan*. Fakultas Ekonomi, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. *Jurnal Maksipreneur* Vol. III No. 1 Desember 2013.
- Huraerah, Abu. 2007. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung : Humaniora.
- Kurniawan, M. Amin. 2015. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Jombang*. Program Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam Universitas Brawijaya. *J-PAL*, Vol. 6, No. 2, 2015.
- Lexy J. Moleong. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sudriamunawar, Haryono. 2006. *Kepemimpinan. Peran Serta dan Produktivitas*. Bandung : Mandar Maju.
- Kumeira, Badar. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Baru Sungai Deras. *journal of residu*, 2018, 2.9: 26-39.
- Sumardi, Nyoman I. 2010. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi & Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.

- Sumarto, Rumsari Hadi dan Lukas Dwiantara. 2019. *Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*. ASMI DESANTA Yogyakarta Vol.2 No.2. Juli 2019. Pp.65-74.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2016. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Edisi Kedua*. Jakarta : Bina Reka Pariwara.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif dan dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, Chyntya. 2014. *Tingkat Keberlanjutan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pinjaman Bergulir di Desa Kotabatu Kabupaten Bogor*. Skripsi. Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.
- William Easterly, 2007. *The Elusive Quest For Growth: Economists' Adventures and Misadventures In The Tropics*. Cambridge and London: MIT Press, 2001. XIII + 342 pages. \$29.95 (cloth).
- Taqiuddin, H. (2021). *Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, dan Konstitusi Sosial*. *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis*, 3(2), 38-55.
- Laksana, N. S. (2013). *Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat desa dalam program desa siaga di Desa Bandung, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal kebijakan dan manajemen publik*, 1(1), 56-66.
- Deswimar, D. (2014). *Peran Program Pemberdayaan Masyarakat desa dalam pembangunan pedesaan*. *Jurnal El-Riyasah*, 5(1), 41-52.

Lubis, A. (2009). *Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Jurnal Tabularasa, 6(2), 181-190.*

Astuti, D. (2021). *Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Dan Kemandirian Masyarakat. Ensiklopedia of Journal, 3(3), 193-205.*

Kaawoan, J. E. (2020). *Peran Tokoh Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa. Politico: Jurnal Ilmu Politik, 9(4).*